

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I P., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amiruddin & Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revi., Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Atmadja, I. D. G., *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*. Malang: Cita Intrans Selaras, 2005.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Badruzaman, M. D., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001.
- BPHN., *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Laporan Workshop Nasional Ocean Summit*, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999.
- Downes, J., & Elliot, J., *Dictionary of Finance and Investment Terms Ed.3*, Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 1999.
- Fajar, M. and Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, L. M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, M. Khozim, Ed. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady, M., *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Gunawan, Y. & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Gurning, R. O. S., & Budiyanto, E. H., *Manajemen Bisnis Pelabuhan*. PT Andhika Prasetya Ekawahana, 2007.

- Hartono, S., *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hijmans, H., *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kansil, C., *Kamus Istilah Hukum*, 2009.
- Kriekhoff, V. J. L., *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Luis, G. J., *Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions Doing it Right*, The World Bank, 2004.
- Mahfud, M. D., *Hukum & Pilar – Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 2
- Manullang, E. F. M., *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pengantar Ilmu Hukum, 2008.
- Mertokusumo, S., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 1993.
- _____, *Teori Hukum*, Cetakan 1., Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2009.
- Muhammad, A., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Nugroho, S. S. & Haryani, A. T., *Perancangan Kontrak (Contract Drafting)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Prodjodikoro, W., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan ke., Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z., *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, H., *Legal Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rusastra, I. W., *Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S., *No Title*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan 14., Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salman, O. & Susanto, A. F., *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama Press, 2004.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soebagojo, F. O., *Pengkajian Aspek Hukum Perjanjian Build Operate and Transfer*, in *Laporan Akhir*, BPHN, Departemen Kehakiman RT, 2018.
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 13., Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2020, hlm. 3
- Soerdjo, I., *Hukum Perjanjian dan Pertanhan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017, hlm. 23
- _____, *Hukum Perjanjian dan Pertanhan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1979.
- Suseno, F. M., *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suteki & Taufani, G., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Alumni, 2020.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Tanya, B. L., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Peraturan Perundang – Undang

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Wilayah Negara.
- _____, *Undang-Undang tentang Pelayaran*. UU No. 21 Tahun 1992, LN SETNEG Tahun 1992.

- _____, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No.138 Tahun 1999
- _____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999
- _____, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003
- _____, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007.
- _____, *Undang-Undang tentang Pelayaran*. UU No. 17 Tahun 2008, LN No.64 Tahun 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia, *tentang Tindak Pidana Korupsi dan Suap disertai dengan Undang-Undang Pencucian Uang*. 2008.
- Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah tentang Perkapalan*. PP No.51 Tahun 2002. LN No. 95 Tahun 2002
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan*. PP No.61 Tahun 2009. LN No.151 Tahun 2009
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan* No. 20 Tahun 2010
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan*. PP No.64 Tahun 2015
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan*. PP No.34 Tahun 2017. LN No. 200 Tahun 2017
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP No. 28 Tahun 2020. LN No.142 Tahun 2020
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran*, PP No.31 Tahun 2021. LN No.41 Tahun 2021
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Perpres No.18 Tahun 2020.
- _____, *Peraturan presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal* No.10 Tahun 2021, LN No.61 Tahun 2021
- Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok*. Permenhub No. PM 38 Tahun 2012.
- _____, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*. Permenhub No. 50 Tahun 2021.

_____, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*. Permenhub No. 146 Tahun 2016.

_____, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*. Permenhub No.57 Tahun 2020. BN No.982 Tahun 2020

_____, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi & Bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan*. Permenhub No.15 Tahun 2015

Keputusan Menteri Perhubungan, *Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*. Kepmen No. KM 54 Tahun 2002.

Menteri BUMN, *Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara*. Permen BUMN No. PER-03/MBU/08/2017. Tahun 2017

Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Permen Dalam Negeri No.19 Tahun 2016

Jurnal

Algabili, M. Z., *Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya)*, *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 4, 2016.

Apriani, D. D., *Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*:Vol. 2, No. 10 Oktober 202.

Hadiyono, V., *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Semarang, 2020.

Hapsari, R. A., *Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang*. Volume 6 Nomor 2 September 2015.

Januardi, *Analisis Yuridis Status Kepemilikan Rumah Susun yang Berdiri diatas Tanah Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019*.

Maryaningsih, N., *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan, Ekonomi Indonesia*, *Buletin ekonomi moneter dan perbankan*, volume 17, no.1, 2014.

Prayogo, R. T., Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *J. Legis. Indones.*, vol. 13, no. 2, 2016.

Internet/Website

- Fajar, P. A., “Memahami Gagasan Omnibus Law”, <https://businessaw.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>, diakses pada 2 Juni 2022.
- Fajrin, A. , *Indonesia sebagai Negara Hukum*, 2017. <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses pada 2 Februari 2020.
- ID Tesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif”, 2013. <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> , diakses pada 18 Mar 2022, pkl. 19.00
- Kemenkominfo, “Menuju Poros Maritim Dunia”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata , diakses pada 1 Feb 2022.
- Nirmala , “Mengenal Sekilas Rencana Induk Pelabuhan Nasional”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/mengenal-sekilas-rencana-induk-pelabuhan-nasional/> , diunduh pada 21 Mei 2022 pkl 13.00 WIB
- Petriella, Y., *Proyek Air Minum Semarang Barat Segera Dilelang*, 2017. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170828/45/684716/proyek-air-minum-semarang-barat-segera-dilelang>. (accessed May 29, 2022).
- Rizaty, M. A., “Terdapat 2.439 Pelabuhan di seluruh Indonesia”, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/27/terdapat-2439-pelabuhan-di-seluruh-indonesia-pada-2020>, diakses pada 23 Mei 2022
- Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia”, <http://media.neliti.com/media/publications/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in.pdf> , diakses pada 7 Feb 2022.
- Tunardy, W. T., *Pengertian Perikatan*, 2012. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perikatan/> diakses pada 5 Mar 2022.